BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dan mempertimbangkan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang dirancang. Tujuan utama dari mengkaji penelitian terdahulu adalah untuk memastikan bahwa proses penelitian yang ditempuh telah sesuai, serta untuk mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi keuangan. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari sudut pandang teoritis tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dan praktisi di bidang akuntansi publik. Penelitian terdahulu telah membahas pentingnya transparansi dan kendala yang dihadapi, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana penerapan transparansi di wilayah tertentu dapat mempengaruhi kepercayaan publik secara

mendalam. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi keuangan serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Temuan
1	Moh.Hamzah (2024)	Transparansi anggaran publik sebagai kunci peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah	Kuantitatif	transparansi anggaran publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat
2	Erlita Annastasya sherly (2025)	Pengaruh transparansi anggaran partisipasi masyarakat,dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan daerah	Kuantitatif	memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah.
3	Zainab Masitha (2024)	Transparansi keuangan daerah	Kuantitatif	Tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
4	Jupri Palulun (2025)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kepercayaan Publik	Kuantitatif	Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen utama yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
5	Ahmad Wahyudi Zein (2025)	Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi	Kuantitatif	transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan

		Anggaran dan Akuntabilitas Pemerintah		masyarakat terhadap pemerintah daerah
6	Eliza handayani lubis (2024)	Analisis akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan keuangan	Kuantitatif	pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Tembung sudah berjalan cukup baik secara internal, namun belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik secara menyeluruh, karena keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat masih rendah.
7	Anang Tri wibowo (2024)	Pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan terhadap kepuasan masyarakat	Kuantitatif	peningkatan transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan secara nyata mampu meningkatkan kepuasan masyarakat
8	Azizah & Kholifah (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan anggaran daerah terhadap Kepercayaan Publik	Kuantitatif	Transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan Akuntabilitas juga tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik
9	Jaya & Yamin (2025)	Pengaruh Penerapan E-Government, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat	Kuantitatif	Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi keuangan daerah merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan yang jujur, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan publik. Informasi tersebut mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran**.** Menurut Mardiasmo (2018), transparansi keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kejelasan penyajian, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara tepat waktu dan dapat dipahami oleh publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurigaan terhadap pengelolaan dana publik. Secara normatif, transparansi keuangan daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Transparansi keuangan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Penelitian Nugraha dan

Novianti (2022) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, karena masyarakat merasa dilibatkan dan memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana publik.

1. Indikator Variabel Transparansi Keuangan Daerah Menurut Mardiasmo (2018),

a. Keterbukaan Informasi Anggaran

Keterbukaan informasi anggaran menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah membuka informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran kepada masyarakat.

b. Kemudahan Akses Informasi Keuangan

Kemudahan akses informasi keuangan berkaitan dengan sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan daerah tanpa hambatan, baik melalui media cetak, papan pengumuman, maupun media digital.

c. Kejelasan Penyajian Laporan Keuangan

Kejelasan penyajian laporan keuangan mengacu pada cara pemerintah menyajikan informasi keuangan secara sistematis, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

d. Ketepatan Waktu Penyampaian Informasi Keuangan

Ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah menyampaikan laporan dan informasi keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

e. Ketersediaan Informasi Keuangan di Ruang Publik

Ketersediaan informasi keuangan di ruang publik mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan informasi anggaran di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti kantor kecamatan atau media publik lainnya.

2.2.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat secara transparan, benar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik.

Akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan administratif pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan secara jujur, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama *good governance*, yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah., akuntabilitas keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Semakin

tinggi tingkat akuntabilitas keuangan daerah, maka semakin besar pula peluang terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

1. Indikator Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah Menurut Mahmudi (2019)

a. Kepatuhan terhadap Peraturan Keuangan

Kepatuhan terhadap peraturan keuangan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kejelasan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Kejelasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran, baik dari sisi peruntukan maupun hasil yang dicapai.

c. Ketepatan Pelaporan Keuangan

Ketepatan pelaporan keuangan berkaitan dengan ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

d. Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran

Pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

e. Keandalan Laporan Keuangan

Keandalan laporan keuangan menunjukkan tingkat keakuratan, kelengkapan, dan kejujuran informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

2.2.3 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Kepercayaan masyarakat merupakan keyakinan publik terhadap kemampuan, integritas, dan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara adil dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik dan program pembangunan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, kebijakan pemerintah akan sulit diterima dan diimplementasikan secara efektif. kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terbentuk melalui proses interaksi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Masyarakat cenderung mempercayai pemerintah yang mampu menunjukkan keterbukaan informasi dan kesungguhan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan persepsi negatif terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat juga berkaitan erat dengan persepsi terhadap kejujuran dan profesionalisme aparatur pemerintah. pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ketika masyarakat merasa bahwa anggaran dikelola secara adil dan terbuka, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Penelitian Wibowo dan Susliyanti (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat di tingkat kecamatan dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah setempat mampu menyampaikan informasi anggaran secara terbuka dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hasil pembangunan, tetapi juga oleh proses pengelolaan keuangan yang transparan dan partisipatif.

1. Indikator Variabel Kepercayaan Masyarakat Menurut Novianti (2022)

a. Keyakinan terhadap Kejujuran Pemerintah

Keyakinan terhadap kejujuran pemerintah menunjukkan sejauh mana masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan publik.

b. Kepercayaan terhadap Penggunaan Anggaran

Kepercayaan terhadap penggunaan anggaran mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa dana publik digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Persepsi Transparansi Pemerintah

Persepsi transparansi pemerintah berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan dan kebijakan publik.

d. Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kepuasan terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan penilaian masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.

e. Kesediaan Masyarakat Mendukung Kebijakan Pemerintah

Kesediaan masyarakat mendukung kebijakan pemerintah mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam sikap menerima dan mendukung kebijakan pemerintah daerah.

2.2.4 Hubungan antara Transparansi keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat

Transparansi keuangan daerah memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana dana publik dikelola, sehingga dapat menilai apakah pemerintah telah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Semakin tinggi tingkat transparansi keuangan daerah, semakin besar pula peluang terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah . transparansi keuangan daerah berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun hubungan yang saling percaya. Keterbukaan informasi anggaran dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan dana daerah. Dengan demikian, transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi

pemerintah di mata masyarakat. transparansi anggaran merupakan salah satu determinan utama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik. Ketika pemerintah secara konsisten menyampaikan informasi keuangan yang jelas dan dapat diakses, masyarakat akan merasa dilibatkan dan dihargai, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat. Berdasarkan berbagai kajian teoritis dan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi keuangan daerah menjadi variabel independen yang relevan untuk diteliti dalam rangka mengetahui pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Dau, Kota Malang.

2.2.5 Hubungan antara akuntabilitas keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan publik secara transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas mencakup kejelasan perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan, ketertiban pelaporan, serta keterbukaan dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga pengawas (Mahmudi, 2019). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terbentuk ketika masyarakat meyakini bahwa pemerintah mampu mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab, bebas dari penyimpangan, dan

berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama *good governance* yang secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

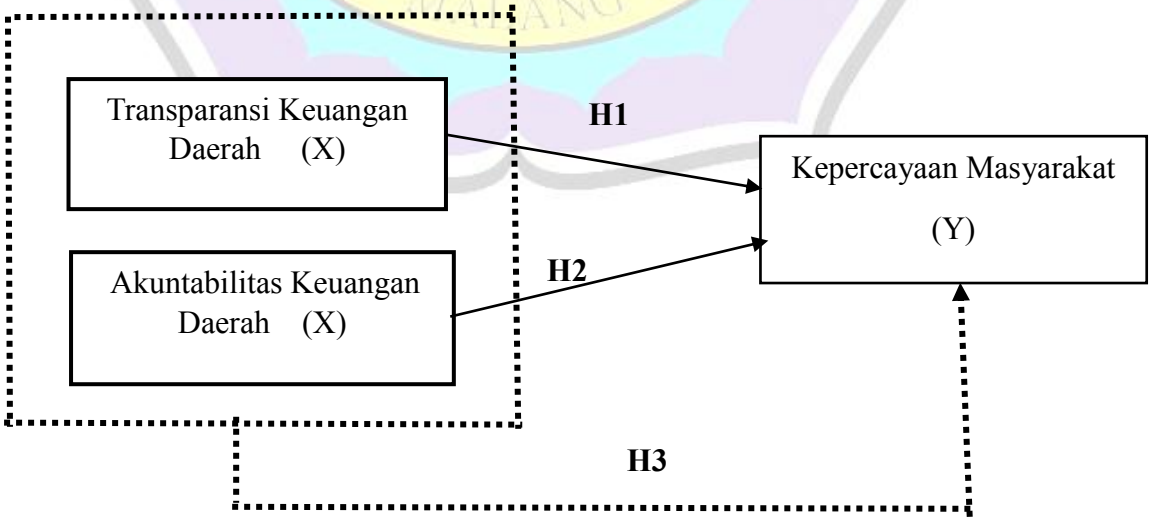
Hubungan antara akuntabilitas keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat bersifat positif dan kausal. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas keuangan daerah, semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini terjadi karena akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah secara objektif melalui laporan keuangan, hasil audit, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Ketika pemerintah daerah mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan memperoleh opini audit yang baik, maka persepsi masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme pemerintah akan meningkat.

2.3 Kerangka berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sebagai dasar terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi keuangan daerah merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat secara jelas dan mudah diakses. Secara teoritis, keterbukaan informasi keuangan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik

dikelola serta menilai kinerja pemerintah secara objektif. Ketika pemerintah daerah secara transparan menyampaikan informasi keuangan, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran dan mengurangi potensi kecurigaan terhadap penyimpangan. Kondisi ini mendorong terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat merupakan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan dan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab. Transparansi keuangan daerah berperan sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan tersebut, karena keterbukaan informasi mencerminkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari pemerintah. Semakin tinggi tingkat transparansi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2.1 Gambar kerangka berpikir



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara terhadap rumusun masalah penelitian,dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Kesimpulan yang tarafnya rendah karna masih membutuhkan pengujian empiris (Sugiyono, 2015)

H□: Transparansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Dau, Kota Malang.

H□: Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di kecamatan Dau , Kota Malang

H□: Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di kecamatan Dau, Kota Malang